



Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) DPMPTSPK

Kab. Tasikmalaya

2021



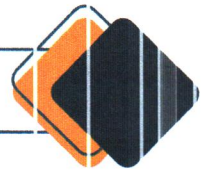
Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP)

DPMPTSP TK

Kab. Tasikmalaya

2021

KATA PENGANTAR



Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSPK) Kabupaten Tasikmalaya mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Rencana Strategis DPMPTSPK Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026.

Laporan kinerja ini merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis DPMPTSPK Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026. Laporan kinerja ini merupakan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis tahun anggaran 2021, wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPMPTSPK Kabupaten Tasikmalaya.

Berdasarkan analisis dan evaluasi yang dilakukan melalui Laporan Kinerja DPMPTSPK Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 ini, diharapkan adanya peningkatan efisiensi, efektivitas kinerja DPMPTSPK Kabupaten Tasikmalaya pada tahun-tahun yang akan datang, sehingga dapat mewujudkan *Good Governance*.

Tasikmalaya, Januari 2022
KEPALA DINAS



H. AGUS BAHTIAR, SE

NIP. 19660211 199202 1 001

Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme pasal 3 menyatakan bahwa salah satu asas penyelenggaraan negara adalah Akuntabilitas, dimana setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada Masyarakat/Rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan adanya SOTK baru kedudukan, struktur organisasi tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu mengalami perubahan dengan bergabungnya bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi, berdasarkan Peraturan Bupati Tasikmalaya No.39 tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah menjadi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja.

Laporan kinerja DPMPTSPK Tahun 2021 disusun sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah atas penggunaan anggaran berdasarkan perjanjian kinerja yang telah disepakati dengan Kepala Daerah.

Penyusunan laporan kinerja DPMPTSPK Tahun 2021 berpedoman pada peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan

Bupati Tasikmalaya No.113 tahun 2016 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Proses penyusunan LKIP dilakukan setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja yang telah dicapai dalam 1 (satu) tahun.

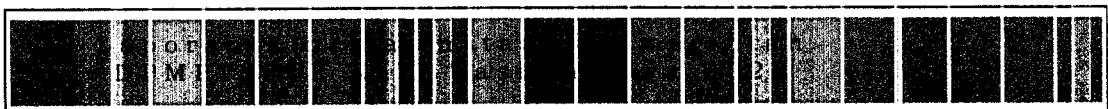
Tujuan Pelaporan kinerja adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dicapai dan upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja perangkat daerah di masa yang akan datang.

A. Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.

1. Kedudukan

- 1) Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, bidang ketenagakerjaan dan bidang transmigrasi.
- 2) Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.



2. Tugas Pokok

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, bidang ketenagakerjaan dan bidang transmigrasi serta tugas pembantuan.

3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, bidang ketenagakerjaan dan bidang transmigrasi.;
2. Pelaksanaan kebijakan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, bidang ketenagakerjaan dan bidang transmigrasi;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, bidang ketenagakerjaan dan bidang transmigrasi;
4. Pelaksanaan administrasi Dinas di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, bidang ketenagakerjaan dan bidang transmigrasi;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati Tasikmalaya sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Tasikmalaya sesuai Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 39 tahun 2021

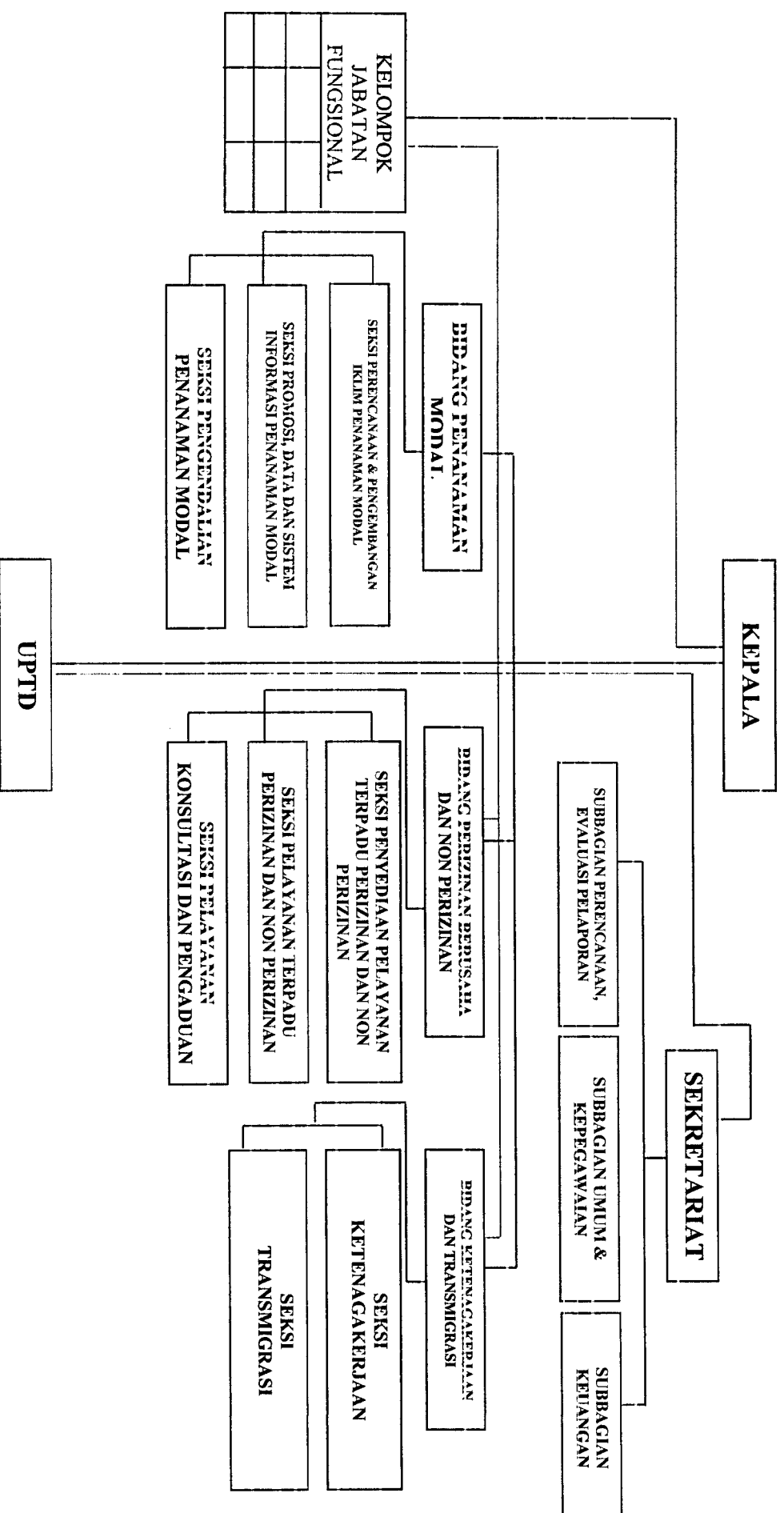


tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Pasal 58, sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi Dan Pelaporan
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - c. Sub Bagian Keuangan
3. Bidang Penanaman Modal, terdiri atas:
 - a. Seksi Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal
 - b. Seksi Promosi, Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
 - c. Seksi Pengendalian Penanaman Modal
4. Bidang Perizinan Berusaha dan Nonperizinan, terdiri atas:
 - a. Seksi Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan
 - b. Seksi Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan
 - c. Seksi Pelayanan Konsultasi dan Pengaduan
5. Bidang Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, terdiri atas:
 - a. Seksi Ketenagakerjaan
 - b. Seksi Transmigrasi
6. Kelompok Jabatan Fungsional
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah



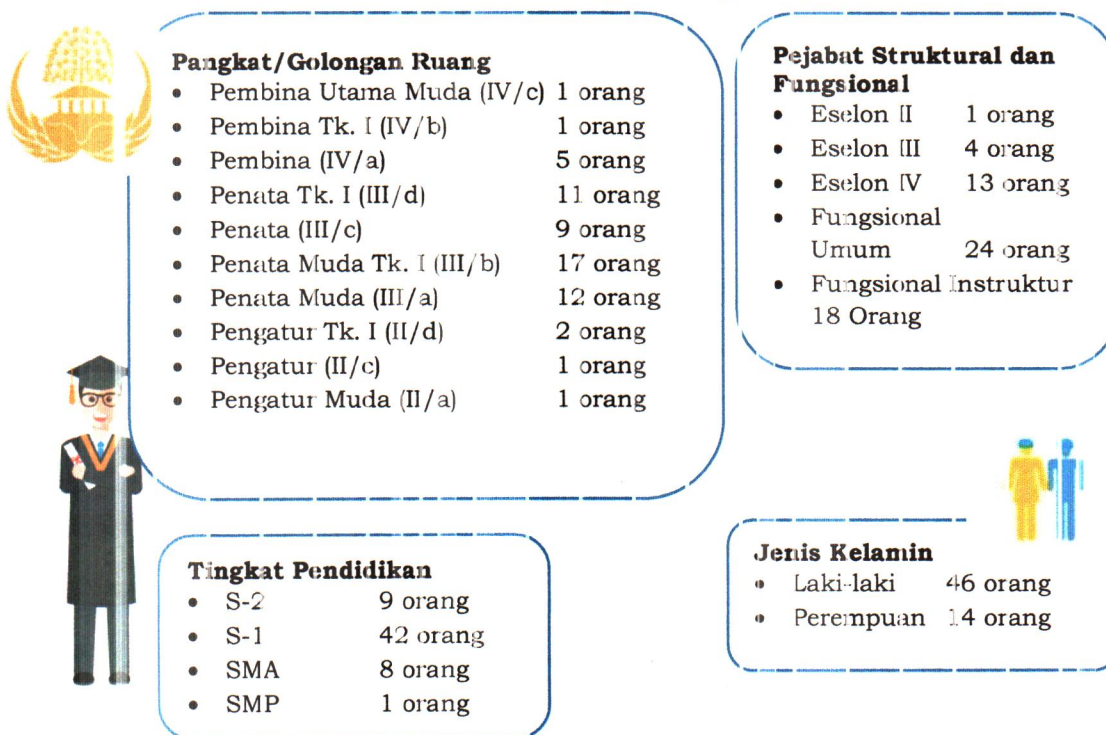
Gambar 1.1
Struktur Organisasi DPMPTSP TK Kabupaten Tasikmalaya



C. Aspek Kepegawaian dan Sarana Prasarana

Sumber Daya Manusia merupakan faktor yang sangat penting dalam suatu organisasi disamping keuangan, material maupun metode. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Tasikmalaya memiliki sumber daya manusia periode tahun 2021 sebanyak 60 Orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan keadaan sebagai berikut:

Tabel 1.1
Jumlah Pegawai Negeri Sipil



Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Tasikmalaya ditunjang dengan sarana dan prasarana kerja sebagai berikut :

Tabel 1.2
Sarana dan Prasarana

No.	Uraian	Jumlah	Ket
1.	Gedung Kantor	1.447 M ²	
	Ruang Kepala	1 unit	
	Ruang Rapat Pimpinan	1 unit	
	Aula	1 unit	
	Ruang Sekretaris	1 unit	
	Ruang Kasubag	3 unit	
	Ruang Kepala Bidang	3 unit	
	Ruang Kepala Seksi	7 unit	
	Ruang Pelayanan (front office)	1 unit	
	Ruang Pengolahan (back office)	1 unit	
	Ruang Penerbitan	1 unit	
	Ruang Arsip	1 unit	
	Ruang Tunggu	1 unit	
	Loket Pembayaran	1 unit	
	Loket Informasi & Pengaduan	1 unit	
	Ruang Rokok	1 unit	
	Ruang Laktasi	1 unit	
	Ruang Satpam	1 unit	
	Ruang Serbaguna	2 unit	
	Ruang Baca dan Bermain Anak	1 unit	
	Musholla	1 unit	
	Pantry	1 unit	
	Kamar Mandi/WC	6 unit	
2.	Kendaraan Roda 4	4 unit	
3.	Kendaraan Roda 2	13 unit	
4.	Komputer/PC	31 unit	
5.	Laptop	13 unit	
6.	Printer	26 unit	
7.	Server	2 unit	
8.	Telephone	1 unit	
9.	Faximili	1 unit	
10.	Infocus	2 unit	
11.	Layar Infocus	2 unit	
12.	Internet		
	Jaringan Speedy 100 Mbs	1 paket	
13.	Sistem Informasi Manajemen Pelayanan :		
	E-mail cpmftsptk@tasikmalayakab.go.id	1 paket	
	Local Area Network Sistem Informasi Manajemen Perizinan	1 paket	

No.	Uraian	Jumlah	Ket
	(SIM Perizinan)		
14.	Tablet	7 unit	
15.	Mesin Penghancur Kertas	2 unit	
16.	Scanner	2 unit	
17.	Digital Kamera	1 unit	
18.	Televisi	1 unit	
19.	USB Adapter	5 unit	
20.	Handphone	1 unit	
21.	Standing Bracket	1 unit	
22.	CCTV	1 set	
23.	Pendingin Ruangan	15 unit	
24.	Tabung Pemadam Kebakaran	2 unit	
25.	Kursi Tunggu Tamu	2 set	
26.	Kursi Sofa	5 set	
27.	Meja Kerja	28 unit	
28.	Meja Pelayanan	1 set	
29.	Kursi Kerja	169 unit	
30.	Lemari Kayu	6 buah	
31.	Lemari Besi	9 buah	
32.	Rak Arsip	21 buah	
33.	Brankas	1 buah	
34.	Perosotan Anak	1 buah	
35.	Kursi Sofa Baca	2 buah	
36.	Rak Buku Minimalis	1 buah	
37.	Meja Popok Laktasi	1 buah	
38.	Lemari Es Laktasi	1 buah	

D. Isu Aktual

Isu-isu strategis yang dihadapi oleh DPMP/SP/TK Kabupaten Tasikmalaya, dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- Memperkuat kontribusi penanaman Modal terhadap pertumbuhan perekonomian dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan.
- Mendorong terciptanya iklim penanaman modal yang berdaya saing, kondusif dan responsif terhadap perubahan lingkungan lokal maupun global.



- c. Mendorong kegiatan penanaman modal untuk mengatasi masalah-masalah pengangguran, peningkatan perekonomian daerah dan pengembangan kemitraan penanaman modal dengan sektor UKM untuk meningkatkan daya saing penanaman modal.
- d. Memperkuat kapasitas kelembagaan khususnya melalui peningkatan kompetensi dan kapasitas aparatur serta tata kelola organisasi guna meningkatkan efisiensi dan efektifitas kinerja.
- e. Optimalisasi Pelayanan UPTD Balai Latihan Kerja melalui penyediaan sarana dan prasana pelatihan dalam hal peningkatan kompetensi calon tenaga kerja agar sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.
- f. Peningkatan Kualitas SDM Transmigran

E. Sistematika Penyusunan

Penulisan Laporan Kinerja DPMPSTPTK Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 disusun dengan sistematika mengacu pada Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor: 113 Tahun 2016 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.



BAB II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan

BAB III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja

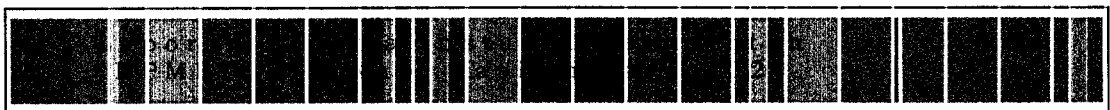
B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja

BAB IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran



A. Rencana Strategis

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 telah disusun arah kebijakan pembangunan untuk mewujudkan perekonomian yang tangguh di bidang agribisnis dan pariwisata adalah dengan meningkatkan perekonomian masyarakat berbasis keunggulan agribisnis dan pariwisata.

Arah kebijakan tersebut menjadi dasar bagi DPMPTSPK Kabupaten Tasikmalaya dalam menyusun Rencana Strategis DPMPTSPK Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 untuk mendukung pencapaian visi Bupati Tasikmalaya Tahun 2021-2026, yaitu : ***“Dengan Semangat Gotong Royong, Mewujudkan Kabupaten Tasikmalaya Yang Religius/Islami, Berdaya Saing dan Sejahtera”***.

Untuk mewujudkan pernyataan visi sebagaimana dimaksud di atas, ditetapkan misi Kabupaten Tasikmalaya, dan yang terkait dengan DPMPTSPK Kabupaten Tasikmalaya adalah misi ke-4, yaitu: ***“Mewujudkan iklim investasi yang kondusif dalam upaya mendorong pengembangan wilayah, dunia usaha dan penciptaan lapangan kerja melalui pengembangan kerjasama skala lokal, nasional, regional, dan global.”***.

Mewujudkan iklim investasi yang kondusif, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Tasikmalaya memiliki peran untuk mewujudkan Kabupaten Tasikmalaya sebagai tujuan investasi.

Selanjutnya berdasarkan visi dan misi tersebut ditetapkan tujuan DPMPTSPK Kabupaten Tasikmalaya yaitu *Meningkatkan daya saing daerah dalam menunjang kemudahan berusaha.*

Sebelum adanya SOTK baru terdapat 3 sasaran strategis yang merupakan kondisi yang akan dicapai oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tasikmalaya sebagai berikut:

1. Meningkatnya iklim investasi
2. Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan; dan
3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja.

IKU DPMPTSP Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya iklim investasi;

Indikator Sasaran :



Jumlah Investor Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)/Penanaman Modal Asing (PMA)



Realisasi Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)/ Penanaman Modal Asing (PMA)

2. Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan; dan



Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan perijinan di kabupaten Tasikmalaya

3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja.



Nilai SAKIP

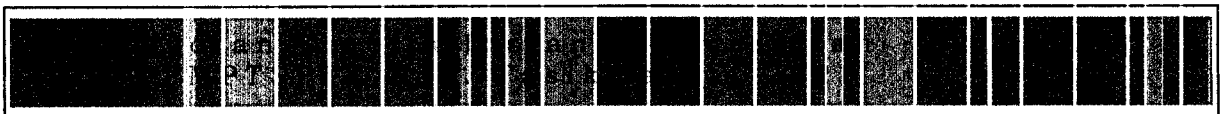
Seiring berjalannya waktu berdasarkan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 39 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah sasaran strategis DPMPTSPTK menjadi 5 sasaran strategis yaitu:

1. Meningkatnya Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah;
2. Meningkatnya realisasi penanaman modal;
3. Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan;
4. Meningkatnya Kesempatan Kerja;
5. Meningkatnya perlindungan tenaga kerja;

Untuk mengukur pencapaian sasaran strategis ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) beserta targetnya per tahun dengan menggunakan SMART-C yaitu *Specific* (spesifik), *Measurable* (dapat diukur), *Agreeable* (dapat disetujui), *Realistic* (realistis), *Time-bounded* (memiliki batas waktu pencapaian), dan *Countinously improved* (dapat disesuaikan dengan perkembangan strategis organisasi).

IKU tersebut seluruhnya bersifat outcome yang sangat dipengaruhi oleh pihak eksternal. Penetapan target yang ditetapkan berdasarkan hasil pembahasan dengan seluruh pejabat struktural di lingkungan DPMPTSPTK Kabupaten Tasikmalaya. IKU DPMPTSPTK Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah;
Indikator Sasaran : Nilai Reformasi Birokrasi
2. Meningkatnya realisasi penanaman modal;
Indikator Sasaran : Nilai realisasi penanaman modal
3. Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan;
Indikator Sasaran : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Perizinan



4. Meningkatnya Kesempatan Kerja;

Indikator Sasaran : Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan

5. Meningkatnya perlindungan tenaga kerja;

Indikator Sasaran : Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak.

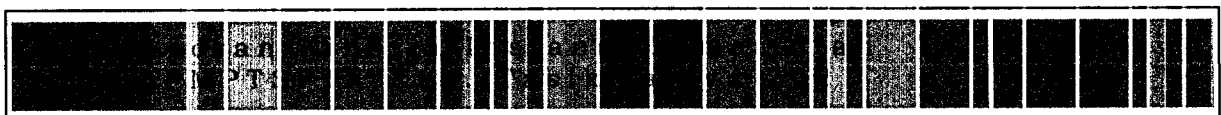
B. Perjanjian Kinerja

Dokumen Renstra selanjutnya dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Tahunan (Renja) yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran.

Terkait dengan penanganan covid-19 terdapat penyesuaian target kinerja karena relokasi dan refocusing anggaran. Perjanjian Kinerja dan Perubahan Renja DPMPTSP TK Kabupaten Tasikmalaya secara garis besar sebagai berikut :

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja DPMPTSP TK Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Sasaran Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2022
1	Meningkatnya Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi	skor	27,5
2	Meningkatnya realisasi penanaman modal	Nilai realisasi penanaman modal	Rp. (Juta)	149.820
3	Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Perizinan	skor	85,8
4	Meningkatnya Kesempatan Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan	%	27,23
5	Meningkatnya perlindungan tenaga kerja	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	%	3,75



Tabel 2.2
Sasaran Program Renja DPMPTSPK Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021

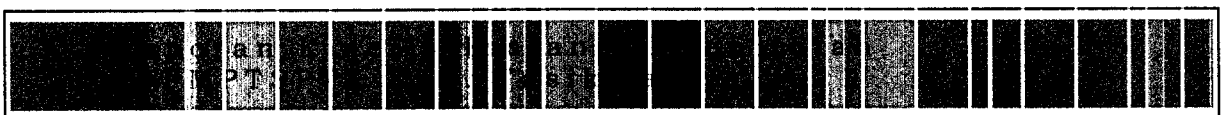
Program	Sasaran Program	Indikator Program	Target
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Nilai IKM Perangkat Daerah	73 85,2
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Meningkatnya realisasi penanaman modal	Persentase kenaikan jumlah Investor	3%
Program Promosi Penanaman Modal	Meningkatnya realisasi penanaman modal	Cakupan promosi potensi unggulan daerah dalam tahun	5 pameran
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Meningkatnya realisasi penanaman modal	Persentase pelaku usaha yang taat LKPM	10%
Program Pelayanan Penanaman Modal	Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan	Jumlah Pelayanan Perizinan dan non Perizinan secara terpadu satu pintu	55
Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan	Persentase Pengelolaan Data Informasi Perizinan dan non Perizinan yang terintegrasi	0%
Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenagakerja	Meningkatnya Kesempatan Kerja	Jumlah pencari kerja yang memiliki sertifikat pelatihan kompetensi	848 orang
Program Penempatan Tenaga Kerja	Meningkatnya Kesempatan Kerja	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan	3281 orang



Program	Sasaran Program	Indikator Program	Target
Program Perencanaan Tenaga Kerja	Meningkatnya Kesempatan Kerja	Tersusunnya dokumen perencanaan tenaga kerja	-
Program Hubungan Industrial	Meningkatnya perlindungan tenaga kerja	Persentase kasus HI yang diselesaikan	100%
Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Meningkatnya Kesempatan Kerja	Jumlah transmigran yang telah difasilitasi pembinaannya	-
Program Pengembangan Kawasan Transmigran	Meningkatnya Kesempatan Kerja	Penyediaan Sarana dan Prasarana Translok	-

Tahapan selanjutnya penyusunan anggaran tahun 2021 berdasarkan pada kegiatan-kegiatan yang mendukung IKU. Pada RKA Perubahan setelah penyesuaian realokasi dan refocusing penanganan covid-19, DPMPTSPK pada tahun 2021 melaksanakan 9 program/14 kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 15.260.006.945,00. Sesuai dengan DPA Perubahan tahun anggaran 2021.

Anggaran sebesar Rp. 15.260.006.945,00 tersebut digunakan untuk mendukung tercapainya 5 sasaran strategis DPMPTSPK Kabupaten Tasikmalaya tahun 2021 dengan alokasi sebagai berikut :



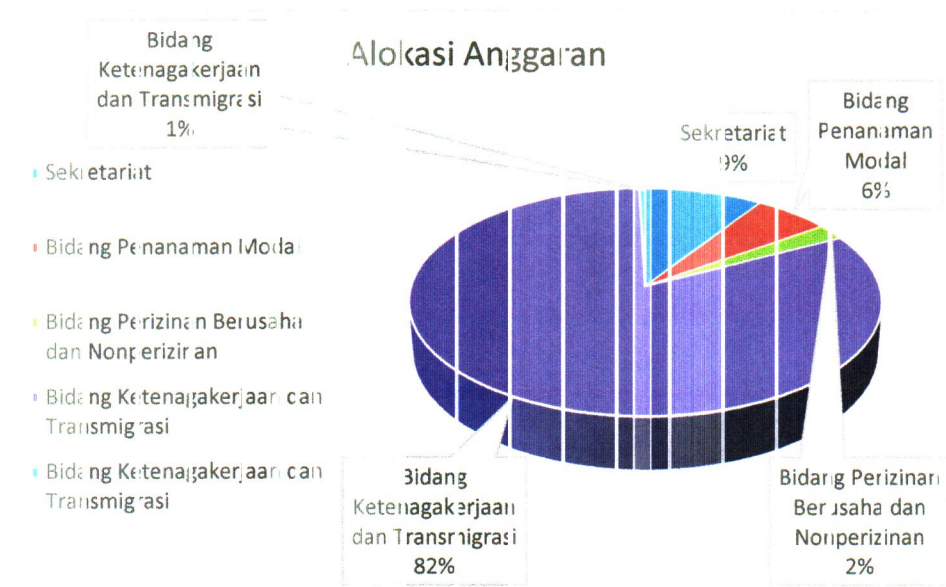
Tabel 2.3
Alokasi Anggaran Sasaran Strategis
DPMP/SPK Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021

Sasaran Strategis	Anggaran (Rp)	Unit Kerja Penanggungjawab
Meningkatkan Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	1.403.007.501	Sekretariat
Meningkatkan realisasi penanaman modal	902.147.400	Bidang Penanaman Modal
Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan	337.750.000	Bidang Perizinan Berusaha dan Nonperizinan
Meningkatkan Kesenmpatan Kerja	12.547.671.794	Bidang Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
Meningkatkan perlindungan tenaga kerja	69.430.250	Bidang Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
JUMLAH	15.260.006.945	

Alokasi anggaran per unit kerja adalah sebagai berikut :

Unit Kerja/Bidang	Anggaran (Rp)	Persentase (%)
Sekretariat	1.403.007.501	9,19
Bidang Penanaman Modal	902.147.400	5,91
Bidang Perizinan Berusaha dan Nonperizinan	337.750.000	2,21
Bidang Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	12.547.671.794	82,22
Bidang Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	69.430.250	0,45
JUMLAH	15.260.006.945	100,00





Gambar 2.1
Diagram Alokasi Anggaran Bidang pada DPMPTSP TK Tahun 2021

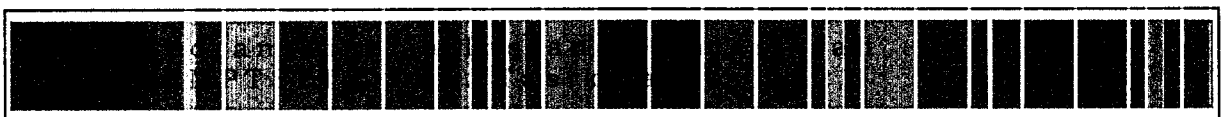
Renja dijadikan acuan dalam penyusunan perjanjian kinerja. Perjanjian kinerja DPMPTSP TK Tahun 2021 telah disusun dan ditandatangani oleh Kepala Dinas dan Bupati Tasikmalaya. Kinerja berisi IKU yang mencakup sasaran, indikator kinerja dan target sebagai berikut:

Tabel 2.4
Sasaran dan Target IKU
DPMPTSP TK Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021

Sasaran	Indikator	Target
Meningkatnya Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi	24,48
Meningkatnya realisasi penanaman modal	Nilai realisasi penanaman modal	Rp. (juta) 145.456

Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Perizinan	85,2
Meningkatnya Kesempatan Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan	27,08%
Meningkatnya perlindungan tenaga kerja	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	2,92%

Perjanjian kinerja diikuti oleh seluruh pejabat struktural mulai dari Sekretariat, Kepala Bidang, Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian. Secara periodik seluruh unit kerja menyampaikan perkembangan rencana aksinya.



A. Capaian Indikator Kinerja Utama

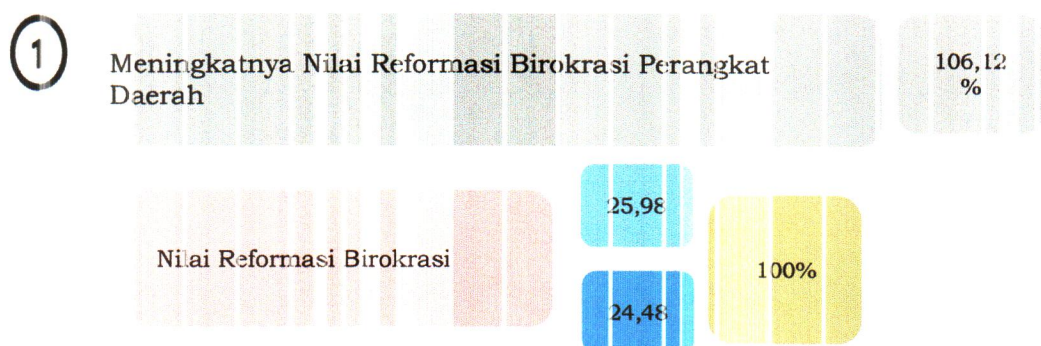
Kinerja DPMPTSPTK tahun 2021 diukur dengan membandingkan antara target setiap indikator kinerja utama dalam perjanjian kinerja dengan realisasinya. Capaian kinerja pada tahun 2021 ini sebesar %.

1. Nilai Reformasi Birokrasi

Reformasi Birokrasi adalah upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan secara mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah terutama yang menyangkut aspek-aspek kelembagaan atau organisasi, ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur.

Untuk mengetahui sejauh mana instansi pemerintah mengimplementasikan Reformasi Birokrasi

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Tasikmalaya yang dilakukan pada tahun 2021, hasil capaian Nilai Reformasi Birokrasi DPMPTSPTK pada tahun anggaran 2021 adalah sebesar berikut :



Tabel 3.1
Capaian Reformasi Birokrasi DPMPTSPTK Tahun 2021

Tabel diatas menunjukkan bahwa target nilai reformasi birokrasi sebesar 24,48 sedangkan realisasi nilai reformasi birokrasi sebesar 25,98 dengan rumus perhitungan nilai realisasi dibagi dengan nilai target, sehingga rata-rata capaian kinerja DPMPTSPK Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2021 mencapai 106,12%.

Hasil evaluasi mengenai capaian kinerja perangkat daerah Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 sebesar 73,37 (Tingkat Akuntabilitas Kinerja BB), sedangkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Perizinan 86,04.



Nilai Realiasi Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2021 berdasarkan data LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) yang dikeluarkan oleh Kementerian Investasi / Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui DPMPTSP Provinsi Jawa Barat adalah Rp. 8.599.700.000,- dari target Rp. 145.456.000.000,- dengan capaian kinerja sebesar 5,91%. Target ini tidak tercapai dikarenakan masih banyaknya para pelaku usaha yang tidak melaporkan secara mandiri Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) melalui aplikasi online yang disediakan oleh Kementerian Investasi / Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), namun berbanding terbalik dengan capaian hasil data Nilai Investasi berdasarkan data OSS-RBA (Online Single Sub Mission – Risk Based Approach) Tahun 2021 di Kabupaten Tasikmalaya. Perhitungan nilai investasi adalah jumlah rencana modal investasi dari para investor yang menanamkan modalnya mulai dari Rp. 500.000.000,00.



Rencana Investasi di Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2021 sebesar Rp. 841.401.984.780,- dengan jumlah investor sebanyak 1.427 pelaku usaha.

Terdapat kenaikan apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2020 sebesar Rp. 750.600.276.197,- atau sebesar 1,12%, sedangkan penurunan jumlah pelaku usaha pada tahun 2020 sebanyak 872 pelaku usaha sehingga penurunannya sebesar 0,35%.

Rumus perhitungan (Jumlah Investasi Tahun $n-1$) diambil dari data LKPM

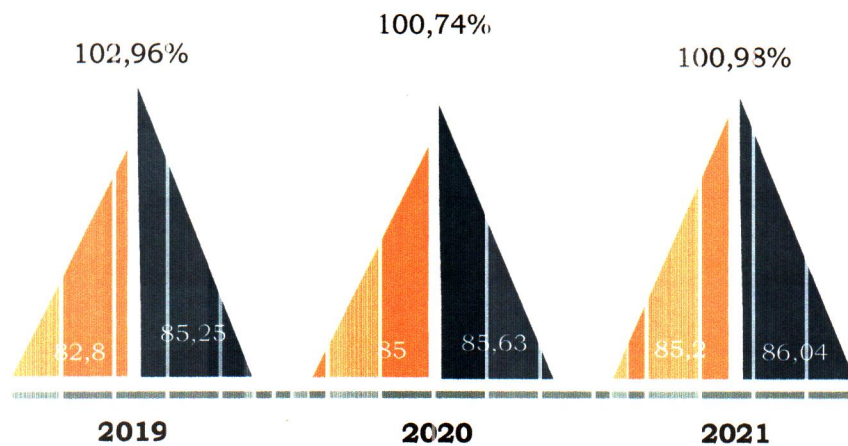


DPMPTSP TK Kabupaten Tasikmalaya dalam beberapa waktu terakhir terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan. Sebagaimana amanat yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Negara memiliki kewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik. Oleh karena itu, dalam hal ini perlu untuk mengetahui sejauh mana dampak yang dihasilkan dari perbaikan tersebut melalui pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), sehingga diperoleh indeks kepuasan masyarakat yang menjadi indikator penilaian kualitas perizinan di Kabupaten Tasikmalaya.

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat. SKM ini bertujuan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik.



DPMPTSPK telah melaksanakan SKM secara online dengan memperhatikan 9 unsur yang terdiri dari persyaratan, sistem, mekanisme dan prosedur, waktu penyelesaian, biaya/tarif, produk spesifikasi jenis pelayanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, penanganan pengaduan, serta sarana dan prasarana. Alamat website SKM Online Kabupaten Tasikmalaya adalah [http // skm.tasikmalayakab.go.id](http://skm.tasikmalayakab.go.id).



Tabel 3.2
Capaian Kinerja Tahun 2019-2021
IKM terhadap Pelayanan Perizinan

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Perizinan di Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2021 sebesar 86,04 (Baik) dari target 85,2 (Baik) dengan capaian kinerja sebesar 100,99. Nilai SKM meningkat jika dibandingkan tahun 2020 dengan besaran 85,63. Hal ini dikarenakan DPMPTSPK terus meningkatkan layanan perizinan dan konsultasi/informasi perizinan baik secara online maupun offline. Kami juga menyediakan layanan Call Center yang dapat membantu masyarakat dalam mengatasi masalah perizinan.



Tabel 3.3 Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan

SASARAN	Meningkatnya Kesempatan Kerja					
	Tahun 2020			Tahun 2021		
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase tenaga kerja yang ditempatkan	25,10 %	23,85	95,02%	27,08	29,37	108,45

Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan pada tahun 2021 sebesar 29,37% dari target 27,08% dengan capaian kinerja sebesar 108,45% terjadi peningkatan persentasi tenaga kerja yang di tempatkan pada tahun 2020 sebesar 23,85%. Jumlah pencari (pencari kerja) yang ditempatkan pada tahun 2021 sebanyak 3.347 orang terjadi peningkatan pencari kerja (pencaker) tahun 2020 sebanyak 3.249 orang. Rumus perhitungan Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan.

$$\frac{\text{Jumlah pencari (pencari kerja) yang ditempatkan}}{\text{Jumlah pencari yang terdaftar}} \times 100\%$$





Tabel 3.4 Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak

SASARAN	Meningkatnya perlindungan tenaga kerja					
	Tahun 2020			Tahun 2021		
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	2%	2,08%	104%	2,92%	3,28	112,32%

Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak pada tahun 2021 sebesar 3,28% dari target 2,92 % dengan capaian kinerja sebesar 112,32% terjadi peningkatan Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak pada tahun 2020 sebesar 2,08%. Jumlah perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak pada tahun 2021 sebanyak 8 perusahaan terjadi peningkatan perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak tahun 2020 sebanyak 5 Perusahaan. Rumus perhitungan Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak.

$$\frac{\text{Jumlah pekerja (pekerja) yang ditempatkan}}{\text{Jumlah pekerja yang terdaftar}} \times 100\%$$



B. Realisasi Anggaran

DPMPTSP TK Kabupaten Tasikmalaya melaksanakan 3 urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu urusan pemerintah bidang penanaman modal dan urusan pemerintah bidang Tenaga Kerja Serta Urusan Transmigrasi. Pada Tahun Anggaran 2021 DPMPTSP TK Kabupaten Tasikmalaya melaksanakan 9 (Sembilan) program, 14 (Empat Belas Sembilan) Kegiatan, 25 Sub Kegiatan.

Anggaran DPMPTSPK Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 sebesar Rp. 15.260.006.945,- : (Rp. 14.518.989.451,- bersumber dari APBD Kabupaten dan Rp. 741.017.494,- bersumber dari DBHCHT) dengan realisasi Rp. 2.593.351.356,- (16,99%) yang terdiri dari :

1. Belanja Operasi Rp. 14.333.305.345,- dengan realisasi Rp. 1.672.820.298,- (11,67%) yang terdiri atas :
 - Belanja Pegawai : Rp. 942.915.361,- dengan realisasi Rp. 381.103.351,- (40,41%)
 - Belanja Barang dan Jasa : Rp. 13.390.389.984,- dengan realisasi Rp. 1.291.716.947,- (9,64%)
2. Belanja Modal Rp. 926.701.600,- dengan realisasi Rp. 920.531.058,- (99,33%) yang terdiri atas
 - Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp. 754.895.800,- dengan realisasi Rp. 749.837.128,- (99,32%)
 - Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp. 171.805.800,- dengan realiasi Rp. 170.693.930,- (99,35%)



Tabel 3.5
Realisasi Anggaran Sasaran Strategis
DPMPTSPK Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021

Sasaran Strategis	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase
Meningkatnya Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	1.403.007.500	856.684.986	61,06%
Meningkatnya realisasi penanaman modal	902.147.400	578.757.562	64,15%
Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan	337.750.000	208.300.330	61,67%
Meningkatnya Kesempatan Kerja	12.547.671.794	881.457.978	7,02%
Meningkatnya perlindungan tenaga kerja	69.430.250	68.150.000	98,15%
JUMLAH	15.260.006.945	2.593.351.356	16,99%



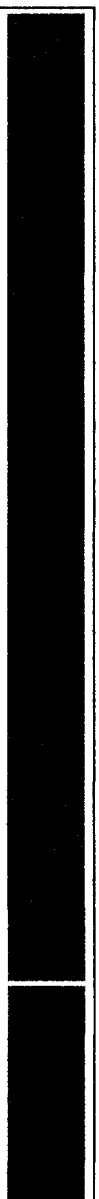
Tabel 3.6
Pelaksanaan Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu dan Tenaga Kerja
Tahun 2021

No	Kebijakan (Renstra/Renja)	Tipe dan Program/Kegiatan	Anggaran			Target Kinerja Program (outcome)/realisasi (output) Tahun 2021	Realisasi Kinerja Program (outcome)/realisasi (output) Tahun 2021
			Rencana	Realisasi	%		
1	2	3	4	5	6	7	8
URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			15.260.006.945	2.593.351.356	16,99%		
1	Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.403.007.501	856.684.986	61,06%		
	1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.030.750	11.580.700	88,87%	Output : Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah sebanyak 41 dokumen Outcome : Persentase dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu	Output : Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah sebanyak 41 dokumen Outcome : Persentase dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu
	1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.506.500	5.803.900	89,20%	Output : Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah sebanyak 4 dokumen Outcome : Persentase dokumen perencanaan yang tersusun tepat waktu	Output : Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah sebanyak 4 dokumen Outcome : Persentase dokumen perencanaan yang tersusun tepat waktu
	1.1.2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.524.250	5.776.800	88,54%	Output : Tersusunnya dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah sebanyak 37 dokumen Outcome : Persentase dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun tepat waktu	Output : Tersusunnya dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah sebanyak 37 dokumen Outcome : Persentase dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun tepat waktu
	1.2	Aktivitas Kegiatan	811.475.361	365.623.351	45,06%	Output : Tersusunnya dokumen administrasi keuangan	Output : Tersusunnya layanan administrasi keuangan

No	Kebijakan (Renstra/Renja)	Uraian Program/kegiatan	Anggaran			Target Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) Tahun 2021	Realisasi Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) Tahun 2021
			Revisi	Revisi	%		
1	2	3	4	5	6	7	8
						Outcome : Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran	Outcome : Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran
						Output : Tersedianya penyediaan gaji dan tunjangan ASN selama 14 bulan	Output : Tersedianya penyediaan gaji dan tunjangan ASN selama 14 bulan
	1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	811.475.361	365.623.351	45,06%	Outcome : Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	Outcome : Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran
						Output : Terselenggaranya layanan administrasi perangkat daerah	Output : Terselenggaranya layanan administrasi perangkat daerah
	1.3	Administrasi Umum Daerah Daerah	299.643.810	266.285.500	88,87%	Outcome : Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	Outcome : Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran
						Output : Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor selama 12 bulan	Output : Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor selama 12 bulan
	1.3.1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	250.818.010	239.917.500	95,65%	Outcome : Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	Outcome : Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran
						Output : Tersedianya barang cetakan dan pengadaan selama 12 bulan	Output : Tersedianya barang cetakan dan pengadaan selama 12 bulan
	1.3.2	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	22.400.800	5.318.000	23,74%	Outcome : Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	Outcome : Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran
						Output : Pengadaan sarana media cetak surat kabar/majalah selama 12 bulan	Output : Pengadaan sarana media cetak surat kabar/majalah selama 12 bulan
	1.3.3	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan	7.500.000	6.725.000	89,67%	Outcome : Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	Outcome : Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran
						Output : Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD selama 12 bulan	Output : Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD selama 12 bulan
	1 3 4	Pengembangan Pusat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	18 925 000	14 325 000	75 69%		



No	Kebijakan (Pemerintah/Banjar)	Uraian Program/Kegiatan	Anggaran			Target Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output) Tahun 2021	Realisasi Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output) Tahun 2021
			Revisi	Revisi	%		
1	2	3	4	5	6	7	8
						Outcome : Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran	Outcome : Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran
						Output : Tersedianya penunjang urusan pemerintah daerah	Output : Tersedianya penunjang urusan pemerintah daerah
	1.4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	97.390.180	70.616.635	72,51%	Outcome : Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran	Output : Tersedianya penunjang urusan pemerintah daerah
						Output : Pembayaran jasa telekomunikasi, air dan listrik selama 12 bulan	Output : Pembayaran jasa telekomunikasi, air dan listrik selama 12 bulan
	1.4.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	36.940.180	20.716.635	56,08%	Outcome : Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran	Output : Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran
						Output : Tersedianya pelayanan umum kantor selama 12 bulan	Output : Tersedianya pelayanan umum kantor selama 12 bulan
	1.4.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	60.450.000	49.900.000	82,57%	Outcome : Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran	Output : Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran
						Output : Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Output : Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	1.5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	161.467.400	142.576.800	78,57%	Outcome : Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran	Output : Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran
						Output : Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional selama 12 bulan	Output : Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional selama 12 bulan
	1.5.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Ferowangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	112.939.400	81.690.800	72,33%	Outcome : Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran	Output : Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran
						Output : Tersedianya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Output : Tersedianya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
	1.5.2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	49.508.000	42.008.000	84,85%		



No	Kebijakan (Renstra / Renja)	Uraian Program/ Kegiatan	Anggaran			Target Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) Tahun 2021	Realisasi Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) Tahun 2021
			Rencana	Realisasi	%		
1	2	3	4	5	6	7	8
						Outcome : Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran	Outcome : Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran
						Output : Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya selama 12 bulan	Output : Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya selama 12 bulan
	1.5.3	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	19.020.000	18.880.000	99,26%	Outcome : Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	Outcome : Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran

URUSAN PEMANAMAN MODAL

2	Desas modal	1	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PEMANAMAN MODAL	394.390.500	253.808.575	64,35%		
		2.1	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota	100.000.000	0	0,00%	Output : Tersedianya (1) dokumen penetapan pemberian fasilitas/insentif bidang penanaman modal	Output : -
							Outcome : Tersedianya fasilitas bidang penanaman modal	Outcome : -
		2.2	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	294.390.500	253.808.575	86,21%	Output : Tersedianya Peta Potensi Investasi	Output : Tersedianya Peta Potensi Investasi
							Outcome : Pengembangan potensi dan peluang usaha	Outcome : Pengembangan potensi dan peluang usaha
		2.2.1	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	294.390.500	253.808.575	86,21%	Output : Jumlah peta potensi dan peluang usaha yang disusun	Output : Jumlah peta potensi dan peluang usaha yang disusun
							Outcome : Pengembangan potensi dan peluang usaha	Outcome : Pengembangan potensi dan peluang usaha
		2	PROGRAM PROMOSI PEMANAMAN MODAL	190.320.900	164.314.487	86,34%		
		3.1	Fasilitasi dan Promosi Penanaman Modal yang	190.320.900	164.314.487	86,34%	Output : Terselenggaranya Promosi Penanaman Modal	Output : Terselenggaranya Promosi Penanaman Modal



No	Kebijakan (Renstra/Renja)	Uraian Program/kegiatan	Anggaran			Target Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) Tahun 2021	Realisasi Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) Tahun 2021
			Revisi	Revisi	%		
1	2	3	4	5	6	7	8
		menjadi Kewenangan Daerah/Kabupaten/Kota				Outcome :	Outcome :
	3.1.1	Pelaksanaan Kegiatan Penguji Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	150.320.500	104.314.407	69,34%	Output : Jumlah pameran yang diikuti (2 Pameran) Outcome : Tepromosikannya potensi penanaman modal	Output : Jumlah pameran yang diikuti (1 Pameran) Outcome : Tepromosikannya potensi penanaman modal
	3	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	317.436.000	160.634.500	50,60%		
	3.1	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang meliputi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	317.436.000	160.634.500	50,60%	Output : Pelaku usaha yang patuh LKPM dan Profil Pemantauan Perusahaan (271 Pelaku Usaha) Outcome : Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal	Output : Pelaku usaha yang patuh LKPM dan Profil Pemantauan Perusahaan (271 Pelaku Usaha) Outcome : Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal
	3.1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	46.194.000	13.179.500	28,53%	Output : LKPM dan Profil Pemantauan Perusahaan (15 Pelaku Usaha) Outcome : Terpentingnya pelaksanaan penanaman modal	Output : LKPM dan Profil Pemantauan Perusahaan (15 Pelaku Usaha) Outcome : Terpentingnya pelaksanaan penanaman modal
	3.1.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	176.862.000	131.640.000	74,43%	Output : Jumlah investor yang mengikuti sosialisasi (216 Pelaku Usaha) Outcome : Terbinaanya Pelaksanaan Penanaman Modal	Output : Jumlah investor yang mengikuti sosialisasi (216 Pelaku Usaha) Outcome : Terbinaanya Pelaksanaan Penanaman Modal
	3.1.3	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguji Pelaksanaan Penanaman Modal	94.380.000	15.815.000	16,76%	Output : Berita Acara Pengawasan dan Profil Pengawasan Perusahaan (40 Pelaku Usaha) Outcome : Terawasnya Pelaksanaan Penanaman Modal	Output : Berita Acara Pengawasan dan Profil Pengawasan Perusahaan (40 Pelaku Usaha) Outcome : Terawasnya Pelaksanaan Penanaman Modal



No	Kebijakan (Rencana/Revisi)	Uraian Program/ Kegiatan	Anggaran			Target Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) Tahun 2021	Realisasi Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) Tahun 2021
			Rencana	Realisasi	%		
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Kualitas pelayanan perizinan	1 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	337.750.000	208.300.830	61,67%		
		1.1 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang PenanamanModal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	37.750.000	37.606.900	99,62%	Output : Terselenggaranya pelayanan perizinan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Output : Terselenggaranya pelayanan perizinan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
		1.1.1 Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan PenanamanModel	37.750.000	37.606.900	99,62%	Output : Jumlah Perizinan yang dilayani (2000 jini), Jumlah sarana dan prasarana yang disediakan (3 paket) Outcome : Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Output : Jumlah Perizinan yang dilayani (9416 jini), Jumlah sarana dan prasarana yang disediakan (3 paket) Outcome : Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
		1.2 Pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu diidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	300.000.000	170.693.930	56,90%	Output : Terselenggaranya perizinan dan non perizinan kewenangan kab/kota Outcome : Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Output : Terselenggaranya perizinan dan non perizinan kewenangan kab/kota Outcome : Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
		1.2.1 Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	300.000.000	170.693.930	56,90%	Output : Jumlah Ruang Pelayanan (1 Ruang), dan 1 DED MPP Outcome : Tertatanya Ruang Pelayanan	Output : Jumlah Ruang Pelayanan (1 Ruang), 0 DED MPP Outcome : Tertatanya Ruang Pelayanan

URUSAN TENAGA KERJA



No	Kebijakan (Rencana/Renja)	Urutan Program/Kegiatan	Anggaran			Target Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) Tahun 2021	Keasaisi Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output) Tahun 2021
			Rencana	Realisasi	%		
1	2	3	4	5	6	7	8
4	Kesempatan Kerja	1 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	2.503.619.494	937.007.978	33,43%	Output : Terlaksananya pelatihan berdasarkan unit kompetensi (1 gelombang sebanyak 21 Pelatihan)	Output : Terlaksananya pelatihan berdasarkan unit kompetensi (0 gelombang sebanyak 0 Pelatihan)
						Output : Terlaksananya pelatihan berdasarkan unit kompetensi (1 gelombang sebanyak 21 Pelatihan)	Output : Terlaksananya pelatihan berdasarkan unit kompetensi (0 gelombang sebanyak 0 Pelatihan)
	1.1	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	2.503.619.494	837.007.978	33,43%	Output : Terlaksananya pelatihan berdasarkan unit kompetensi (5 gelombang sebanyak 53 Pelatihan)	Output : Terlaksananya pelatihan berdasarkan unit kompetensi (3 gelombang sebanyak 32 Pelatihan)
						Output : Terlaksananya masyarakat di lingkungan Kabupaten Tasikmalaya melalui pelatihan keterampilan kerja berbasis kompetensi yang dilaksanakan di tempat (MTU)	Output : Terlaksananya masyarakat di lingkungan Kabupaten Tasikmalaya melalui pelatihan keterampilan kerja berbasis kompetensi yang dilaksanakan di tempat (MTU)
						Output : Masyarakat yang mengikuti pelatihan (336 orang)	Output : Masyarakat yang mengikuti pelatihan (0 orang)
		Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Master Kompetensi	2.503.619.494	837.007.978	33,43%	Output : Terlaksananya masyarakat di lingkungan Kabupaten Tasikmalaya melalui pelatihan keterampilan kerja berbasis kompetensi yang dilaksanakan di tempat (MTU)	Output : Terlaksananya masyarakat di lingkungan Kabupaten Tasikmalaya melalui pelatihan keterampilan kerja berbasis kompetensi yang dilaksanakan di tempat (MTU)
	1.1.1		2.503.619.494	837.007.978	33,43%	Output : Terlaksananya masyarakat di lingkungan Kabupaten Tasikmalaya melalui pelatihan keterampilan kerja berbasis kompetensi yang dilaksanakan di tempat (MTU)	Output : Terlaksananya masyarakat di lingkungan Kabupaten Tasikmalaya melalui pelatihan keterampilan kerja berbasis kompetensi yang dilaksanakan di tempat (MTU)
	2	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	10.042.925.500	43.350.000	0,43%		

[illegible]

No	Kebijakan (Program/Regulasi)	Uraian Program/Regulasi	Anggaran			Target Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) Tahun 2021	Realisasi Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) Tahun 2021
			Rencana	Realisasi	%		
1	2	3	4	5	6	7	8
		2.1 Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	10.042.925.500	43.350.000	0,43%	Output : Kegiatan pelayanan antarkerja (12 Bulan) Outcome : Tersedianya pelayanan antarkerja	Output : Kegiatan pelayanan antarkerja (12 Bulan) Outcome : Tersedianya pelayanan antarkerja
		2.1.1 Pelayanan antar Kerja	43.300.000	43.350.000	99,91%	Output : Tersedianya operator (6 orang) Outcome : Terlayaninya pelayanan AK 1	Output : Tersedianya operator (6 orang) Outcome : Terlayaninya pelayanan AK 1
		2.1.2 Perluasan Kesempatan Kerja	9.999.535.500	0	0,00%	Output : Jumlah kegiatan Kesempatan Kerja (40 paket) Outcome : Tersedianya kesempatan kerja	Output : - Outcome : -
5	Perlindungan tenaga kerja	3 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIA	69.430.250	68.150.000	98,16%	Output : Fasilitas Pencegahan dan Penyelidikan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan Outcome : Tersedianya permasalahan dalam Pencegahan dan Penyelidikan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan	Output : Fasilitas Pencegahan dan Penyelidikan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan Outcome : Tersedianya permasalahan dalam Pencegahan dan Penyelidikan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan
		3.1 Pencegahan dan Penyelidikan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	69.430.250	68.150.000	98,16%	Output : Fasilitas Pencegahan dan Penyelidikan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan Outcome : Tersedianya permasalahan dalam Pencegahan dan Penyelidikan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan	Output : Fasilitas Pencegahan dan Penyelidikan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan Outcome : Tersedianya permasalahan dalam Pencegahan dan Penyelidikan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan
		3.1.1 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang	7.520.250	7.385.000	98,20%	Output : Peringatan Hari Buruh (1 keg)	Output : Peringatan Hari Buruh (1 keg)



No	Kebijakan (Menteri/Revisi)	Uraian Program/Kegiatan	Anggaran			Target Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output) Tahun 2021		Realisasi Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output) Tahun 2021	
			Rencana	Realisasi	%				
1	2	3	4	5	6	7	8		
		Berkaitan/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				Outcome : Terselenggaranya dan terfasilitasinya peringatan hari buruh	Outcome : Terselenggaranya dan terfasilitasinya peringatan hari buruh		
		3.1.2 Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	61.910.000	60.765.000	98,15%	Output : Pertemuan LKS TRIPARTIT (4 kali) Outcome : Terbangunnya kerjasama tripartid daerah	Output : Pertemuan LKS TRIPARTIT (4 kali) Outcome : Terbangunnya kerjasama tripartid daerah		
URUSAN TRANSMIGRASI									
6	Kesejahteraan Kerja	1	1.126.800	1.100.000	97,62%				
		1.1 Penataan Persebaran Penduduk yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.126.800	1.100.000	97,62%	Output : Terselenggaranya koordinasi dan sinkronisasi kerjasama transmigrasi (1 Keg) Outcome :	Output : Terselenggaranya koordinasi dan sinkronisasi kerjasama transmigrasi (1 Keg) Outcome :		
		Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang berasal dari 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	1.126.800	1.100.000	97,62%	Output : Terlaksananya money u ausung-asu lokal (1 lokasi) Outcome : Terjalinya kerjasama pembangunan transmigrasi	Output : Terlaksananya money u ausung-asu lokal (1 lokasi) Outcome : Terjalinya kerjasama pembangunan transmigrasi		



Tabel 3.7
Kinerja Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

No	Urusan Pemerintahan	Urutan Program/Kegiatan	Target Kinerja	Realisasi	%
1	2	5	6	7	8
	PENUNJANG	1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	100 Persen	100 Persen	100,00%
		1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	41 Persen	41,00%
		1.1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	100,00%
		1.1.2 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	37 Dokumen	37 Dokumen	100,00%
		1.2 Administrasi Keuangan Daerah	100 Persen	14 Persen	14,00%
		1.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14 Bulan	14 Bulan	100,00%
		1.3 Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	48 Persen	48,00%
		1.3.1 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	12 Bulan	100,00%
		1.3.2 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12 Bulan	12 Bulan	100,00%
		1.3.3 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan	12 Bulan	100,00%
		1.3.4 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan	12 Bulan	100,00%
		1.4 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	24 Persen	24,00%
		1.4.1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	12 Bulan	100,00%
		1.4.2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	12 Bulan	100,00%
		1.5 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	36 Persen	36,00%
		1.5.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jajaran	12 Bulan	12 Bulan	100,00%
		1.5.2 Pemeliharaan, Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12 Bulan	12 Bulan	100,00%
		1.5.3 Pemeliharaan, Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12 Bulan	12 Bulan	100,00%
1	URUSAN PENANAMAN MODAL	1 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	3 Persen	13,76 Persen	358,67%
		2.1 Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Hibrida ng penanaman modal yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota	1 Dokumen	0 Dokumen	0,00%
		2.2 Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	1 Buku	1 Buku	100,00%
		2.2.1 Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	1 Buku	1 Buku	100,00%
		2 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	5 Panieran	1 Panieran	20,00%
		3.1 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah kabupaten/kota	1 Panieran	1 Panieran	100,00%

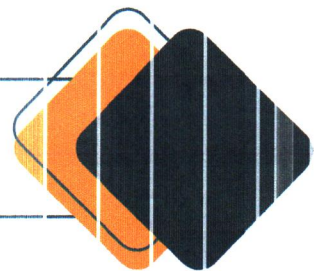


No	Urusan Pemerintahan	Uraian Program/Kegiatan		Target Kinerja		Realisasi		%
1	2	5		5		7		8
		3.1.1	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1	Pameran	1	Pameran	100,00%
		3	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	12	Persen	12	Persen	100,00%
		3.1	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	271	Pelaku Usaha	271	Pelaku Usaha	100,00%
		3.1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	15	Pelaku Usaha	15	Pelaku Usaha	100,00%
		3.1.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	216	Pelaku Usaha	216	Pelaku Usaha	100,00%
		3.1.3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	40	Pelaku Usaha	40	Pelaku Usaha	100,00%
		1	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	85,20	Skor/ Indeks	86,04	Skor/ Indeks	100,99%
		1.1	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang PeranamanModal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	100	Persen	9.416	Persen	9.416,00%
		1.1.1	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan PeranamanModal	2.000	Ijin	9.416	Ijin	470,80%
		1.2	Pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu dibidang peranaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	1	Kegiatan	0	Kegiatan	0,00%
		1.2.1	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	1	Dokumen	0	Dokumen	0,00%
				1	Ruangan	1	Ruangan	100,00%
2	URUSAN TENAGA KERJA	1	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	848	Orang	512	Orang	60,38%
		1.1	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	848	Orang	512	Orang	60,38%
		1.1.1	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	848	Orang		Orang	0,00%
		2	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	3.281	orang	3.347	orang	102,01%
		2.1	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	3.281	orang	3.347	orang	102,01%



No	Urusan Pemerintahan	Uraian Program/Kegiatan		Target Kinerja	Realisasi	%
1	2		5	6	7	8
		2.1.1	Pelayanan antar Kerja	6 Orang/bulan	6 Orang/bulan	100,00%
		2.1.2	Perluasan Kesempatan Kerja	40 Paket	0 Paket	0,00%
		3	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	100 Persen	100 Persen	100,00%
		3.1	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	5 Keg	5 keg	100,00%
		3.1.1	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Keg	1 Keg	100,00%
		3.1.2	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	4 Kali	4 Kali	100,00%
3	URUSAN TRANSMIGRASI	1	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	1 keg	1 keg	100,00%
		1.1	Penataan Persebaran Penduduk yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 keg	1 keg	100,00%
		1.1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang berasal dari 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	1 keg	1 keg	100,00%

P E N U T U P



Laporan kinerja adalah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Laporan Kinerja ini menggambarkan kinerja dan evaluasi terhadap kinerja DPMPTSPK Kabupaten Tasikmalaya yang telah dicapai.

Pada tahun 2021, DPMPTSPK Kabupaten Tasikmalaya telah menetapkan 5 (lima) sasaran strategis dengan 5 (lima) indikator kinerja utama, sesuai dengan Rencana Kerja (Renja) dan Perjanjian Kinerja DPMPTSPK Tahun 2021, dengan rincian sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Persentase Capaian IKU
1	Meningkatnya Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi	24,48 (poin)	25,98 (poin)	106,12%
2	Meningkatnya realisasi penanaman modal	Nilai realisasi penanaman modal	Rp. (juta) 145.456	Rp. (juta) 8.599,7	5,91 %
3	Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Perizinan	85,2	86,04	100,99%
4	Meningkatnya Kesempatan Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan	27,08%	29,37%	108,45%

5	Meningkatnya perlindungan tenaga kerja	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	2,92%	3,28%	112,32%
---	--	--	-------	-------	---------

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat di simpulkan bahwa realisasi pada indikator kinerja utama ada yang mengalami kenaikan. Akan tetapi pada indikator nilai realisasi penanaman modal mengalami penurunan dikarenakan masih banyaknya para pelaku usaha yang tidak melaporkan secara mandiri Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) melalui aplikasi online yang disediakan oleh Kementerian Investasi / Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Terlepas dari tercapainya seluruh indikator kinerja DPMPTSPK Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2021, masih banyak tantangan dan permasalahan yang harus dihadapi. Penguatan lembaga, peningkatan kualitas sumber daya aparatur DPMPTSPK Kabupaten Tasikmalaya, peningkatan sarana dan prasarana pelayanan perizinan secara elektronik, pengendalian pelaksanaan penanaman modal akan menjadi prioritas di tahun yang akan datang dan peningkatan kompetensi calon tenaga kerja untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja.

Tasikmalaya, Januari 2022
Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan
Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
Kabupaten Tasikmalaya



H. AGUS BAHTIAR, S.E.
NIP. 19660211 199202 1 001